

PENGARUH KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KINERJA PEMDA DI WILAYAH SUMATERA

Andi Riansyah, Khairudin

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

*Corresponding Author:
Andi Riansyah

Abstract.

The purpose of this study is to determine and analyze the effect of environmental quality on the performance of local governments in the Sumatra region. This type of research uses quantitative research. This study was conducted on 10 Regional Governments in the Sumatra region in the 2019-2022 period. So that the sample used was 40 research samples. The results of the study show that the Environment has a positive and significant effect on the performance of the Regional Government in the Sumatra region. This can be seen from the results of the t-test where the t-value of the independent variable IKLH (X) is 2.426 and the sig value is 0.020 so that it can be concluded that in this study for the IKLH variable (X) with a t-value of $2.426 > t \text{ table } 2.024$ with a Sig level. $0.020 < 0.05$. So that the IKLH variable (X) partially has a significant effect on Performance (Y) in 10 Provinces in the Sumatra region for the 2019-2022 period. It is recommended for further research to add research samples and other independent variables that can be used to analyze the influence on the performance of the Regional Government.

Keywords: Environment, Performance, Regional Government

PENDAHULUAN

Masyarakat menuntut pemerintah untuk memiliki kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan yang baik setiap tahunnya. Hal ini dinilai wajar karena masyarakat merupakan pihak principal yang telah mempercayakan pengelolaan pemerintahan kepada pihak eksekutif, disamping itu kinerja pemerintah yang baik dapat meningkatkan kepuasan publik (Beerli, Uster & Vigoda-Gadot, 2019; Weitz-Shapiro, 2008); meningkatkan kepercayaan publik (Bone, 2017); meningkatkan legitimasi dan dukungan publik (Ahyaruddin & Amrillah, 2018; Ashworth, Boyne & Delbridge, 2009; Blume & Voigt, 2011); meningkatkan nilai organisasi (Hermawan & Maf'ulah, 2014; Kurniati, 2019); meningkatkan nilai investasi (Desbordes & Wei, 2017; Maqbool & Zamir, 2020) dan meningkatkan keberlangsungan hidup organisasi (Paeleman & Vanacker, 2015).

Problem terkait kinerja pemerintah Indonesia di tingkat internasional selama periode 2020-2022 dari sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan belum sesuai harapan publik. Data dari UNDP 2023 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Indonesia selama periode tersebut berada pada ranking 5 dibawah rangking negara-negara ASEAN lainnya, seperti: Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Secara lengkap perkembangan Indeks Pembangunan Manusia negara ASEAN periode 2020-2022 sebagai berikut.

Tabel 1. IPM Negara ASEAN 2020-2022

No	Negara ASEAN	2020		2021		2022	
		IPM	Rangking	IPM	Rangking	IPM	Rangking
1	Brunei Darusalam	83,8	2	82,9	2	83,3	2
2	Filipina	71,8	6	69,9	6	70,4	6
3	Indonesia	71,8	5	72,2	5	72,9	5
4	Kamboja	59,4	9	59,3	9	59,8	9
5	Laos	61,3	8	60,7	8	61,1	8
6	Malaysia	81	3	80,3	3	80,7	3
7	Myanmar	58,3	10	58,5	10	59,1	10
8	Singapura	93,8	1	93,9	1	93,9	1
9	Thailand	77,7	4	80	4	79,2	4
10	Vietnam	70,4	7	70,3	7	70,6	7

Sumber: UNDP, 2023

Penelitian tentang kinerja pemerintah daerah yang dikaitkan dengan kualitas lingkungan hidup belum pernah dilakukan oleh peneliti di Indonesia. Peneliti di Indonesia selama ini hanya mengaitkan kinerja pemerintah daerah dengan pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi (Jatmiko, 2020); good government governance dan ukuran legislatif (Gustianra & Serly, 2019; Hutapea & Widyaningsih, 2017; Lestiawan & Jatmiko, 2015); karakteristik pemerintah daerah (Nugroho & Prasetyo, 2018; Noviyanti & Kiswanto, 2016; Harumiati & Payamta, 2014); temuan audit (Noviyanti & Kiswanto, 2016; Harumiati & Payamta, 2014; Tama & Adi, 2018); Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Pajak Daerah (Sesotyanningtyas, 2012); karakteristik kepala daerah (Pahlevi & Setiawan, 2017); budaya organisasi, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, dan kompetensi (Sutrisno & Purnomosidhi, 2013). Peneliti di dunia yang melakukan riset tentang pengaruh kualitas lingkungan hidup terhadap kinerja pemerintah juga masih sangat langka, hanya Budding (2004) dimana hasil penelitian

menunjukkan lingkungan berdampak terhadap meningkatnya kinerja pemerintah. Dan penelitian yang dilakukan oleh Taliento, Favino & Netti (2019) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial, lingkungan dan tata kelola berperan penting dalam meningkatkan kinerja.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah dalam waktu tertentu. Penyusunan IKLH terkait erat dengan kebutuhan sasaran pengarusutamaan pembangunan dan berkelanjutan dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022. IKLH juga telah menjadi sasaran strategis indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mengukur dampak dari kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan.

Pemerintah Daerah perlu memperhatikan peningkatan pertumbuhan ekonomi namun juga peningkatan kualitas lingkungan hidup agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan yang akan menyebabkan kerugian ekonomi. Sehingga perlu adanya pembangunan yang berkelanjutan dengan peran serta pemerintah. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas lingkungan hidup terhadap kinerja pemerintah daerah di wilayah Sumatera.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Kinerja Pemerintah Daerah

Istilah kinerja dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah *performance*. Kinerja bukan merupakan karakteristik seseorang, seperti bakat atau kemampuan, tetapi merupakan perwujudan dari bakat atau kemampuan itu sendiri, (Sedarmayanti, 2017). Pemerintah atau *govermment* dalam bahasa Indonesia) berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Dapat juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya. (Riawan, 2019). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak.

Tercapainya tujuan pembangunan yang tercermin pada indeks pembangunan manusia sangat tergantung pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang (Marisca dan Haryadi, 2016). Lembaga UNDP (*United Nations Development Programt*) telah mempublikasikan laporan pembangunan sumber daya manusia yang disebut HDI (Human Development Indeks) dalam bentuk kuantitatif. HDI merupakan tolak ukur yang dirumuskan secara konstan

dalam pembangunan sumber daya manusia, sehingga gambaran pembangunan tidak akan ditangkap secara sempurna. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia menyangkup tiga indikator yang telah di sepakati yakni indeks pendidikan (IPD), indeks harapan hidup (IHH) dan indeks pendapatan/daya beli dengan rumus sebagai berikut.

$$IPM = 1/3 \times (IPD \times IHH \times IP)$$

Lingkungan Hidup

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Menurut Emil Salim (2017) Lingkungan hidup sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang berada dalam suatu ruang dan mempengaruhi kehidupan termasuk manusia. Definisi ini mengandung arti luas. Jika disederhanakan dengan batasan dan faktor yang bisa dijangkau manusia maka faktor tersebut diantaranya alam, politik, ekonomi, keadaan sosial.

Lingkungan hidup menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sehingga lingkungan hidup merupakan tempat berlangsungnya bermacam - macam interaksi sosial antara berbagai kelompok manusia yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan memengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dalam melakukan aktifitasnya.

IKLH sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep IKL dan konsep EPI (Environmental Performance Index). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH tingkat Provinsi adalah :

$$IKLH = (0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,009 \times IKAL)$$

Hipotesis

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, Kualitas lingkungan hidup saat ini dinilai secara kuantitatif menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan publikasi yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup Indonesia. IKLH dapat digunakan untuk mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. (Suryani, 2017). IKLH difokuskan pada media lingkungan air, udara, dan tutupan lahan. Sedangkan kinerja Pemerintah Daerah merupakan gambaran mengenai pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi maupun strategi instansi tersebut yang mengindikasikan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Tercapainya tujuan pembangunan yang tercermin dalam indeks pembangunan manusia. Sehingga hipotesis di dalam penelitian ini yakni sebagai berikut.

Ha : Terdapat pengaruh lingkungan hidup terhadap kinerja Pemerintah Daerah

Ho : Tidak terdapat pengaruh lingkungan hidup terhadap kinerja Pemerintah Daerah

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Peneliti yang menggunakan pendekatan kuantitatif akan menguji suatu teori dengan cara merinci suatu hipotesis-hipotesis yang spesifik, lalu mengumpulkan data untuk mendukung atau membantah hipotesis-hipotesis tersebut dengan pendekatan deskriptif yang dijelaskan dengan kata atau kalimat-kalimat agar mudah dipahami dan dimengerti. (Moelong,2018). Penelitian ini dilakukan terhadap 10 Pemerintah Daerah yang ada di wilayah Sumatera pada tahun periode 2019-2022. Sehingga sampel yang digunakan yakni sebanyak 40 sampel penelitian.

Tabel 2. Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel	Pengukuran Variabel
Lingkungan Hidup (X) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa lingkungan hidup	IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara,

adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.	Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. (Permen-LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup). Perhitungan IKLH di tingkat Provinsi dengan rumus : $IKLH = \underline{(0,340 \times IKA)} + \underline{(0,428 \times IKU)} + \underline{(0,133 \times IKL)} + \underline{(0,009 \times IKAL)}$
Kinerja Pemerintah Daerah (Y) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak.	IPM merupakan capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. (BPS,2022) Perhitungan IPM dengan rumus : $IPM = 1/3 \times (IPD \times IHH \times IP)$

Pengumpulan data dalam penelitian ini yakni menggunakan data sekunder. Dalam penelitian ini sumber data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan, jurnal-jurnal akademis, buku-buku ataupun sumber literasi lain yang masih berhubungan di dalam penelitian ini. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji regresi linear sederhana dan uji t.

1. Uji Statistik Deskriptif

Menurut Ghazali (2018) statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek penelitian melalui data sampel atau populasi. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum dan minimum. Statistik deskriptif juga merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

2. Uji Regresi Sederhana

Analisis Regresi Linier Sederhana merupakan model regresi yang melibatkan satu variabel independen untuk mengukur ada atau tidaknya pengaruh antara lingkungan hidup sebagai variabel independen dan kinerja pemerintah sebagai variabel dependen. Rumus regresi linier sederhana

dalam penelitian ini menggunakan rumus menurut Ghazali (2018) sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X + et$$

Keterangan :

Y	: Kinerja Pemerintah
α	: Konstanta
β	: Koefisien Regresi
X	: Lingkungan Hidup
et	: <i>error term</i>

3. Uji t

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial (individu) dari variable bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Menurut Ghazali (2018) Uji t digunakan untuk mengetahui variable independen berpengaruh signifikan terhadap variable dependen secara parsial. Sebagai dasar pengambilan keputusan dapat digunakan kriteria pengujian 2 tail dimana t_{hitung} menggunakan tingkat kepercayaan 95 % = 0,05 sebagai berikut:

- Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai Sig < 0,05 maka hal ini berarti variabel bebas (X) secara individual berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).
- Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai Sig > 0,05 maka hal ini berarti variabel bebas (X) secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).

PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kualitas lingkungan hidup terhadap kinerja Pemda di wilayah Sumatera. Penelitian ini menggunakan 40 sampel kinerja Pemda di wilayah Sumatera tahun periode 2019-2022. Uji analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji regresi sederhana dan uji t dengan hasil sebagai berikut.

1. Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran

atau mendeskripsikan data dalam variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), minimum, maksimum dan standar deviasi.

Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IKLH	40	57,37	78,29	70,1400	4,29512
Kinerja	40	69,57	76,46	72,0690	1,61353
Valid N (listwise)	40				

Sumber : Diolah Penulis Tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa N atau jumlah data setiap variabel yang valid berjumlah 40 yang terdiri dari 10 Pemerintah Daerah di Wilayah Sumatera periode 2019-2022. Dari 40 data sampel Kinerja (Y) diketahui nilai maksimum sebesar 76,46, nilai minimum sebesar 69,57, nilai mean sebesar 72,0690, serta nilai standar deviasi sebesar 1,61353 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

Nilai maksimum kinerja sebesar 76,46 yakni di Provinsi Kep Riau periode tahun 2022. Tingginya nilai kinerja di Provinsi Kep Riau menunjukkan adanya peningkatan nilai IPM tiap tahunnya selama periode tahun 2019-2022. Faktor utama yang mempengaruhi kinerja Pemda di suatu wilayah adalah pendidikan, kesehatan serta pendapatan daerah. Sehingga hal tersebut menunjukan bahwa Kep Riau memiliki kinerja tertinggi di wilayah Sumatera periode 2019-2022. Nilai minimum kinerja sebesar 69,57 yakni di Provinsi Lampung yakni periode tahun 2019. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan rendahnya nilai IPM di Provinsi Lampung seperti keterbatasan akses pendidikan, pelayanan kesehatan yang tidak baik, ketidaksetaraan ekonomi maupun infrastruktur pembangunan yang buruk.

Dari 40 data sampel IKLH (X) dari 10 Provinsi di wilayah Sumatera dari periode 2019-2022 diketahui nilai maksimum sebesar 78,29, nilai minimum sebesar 57,37 nilai mean sebesar 70,1400, serta nilai standar deviasi sebesar 4,29512 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya juga merata.

Nilai maksimum IKLH sebesar 78,29 yakni di Provinsi Aceh periode tahun 2022. Tingginya nilai IKLH di Provinsi Aceh dikarenakan nilai Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut, dan Indeks Kualitas Lahan yang baik sehingga hal tersebut menjelaskan bahwa Provinisi Aceh memiliki kualitas lingkungan hidup yang baik. Nilai minimum kinerja sebesar 57,37 yakni di Provinsi Lampung yakni periode

tahun 2019. Banyak faktor yang dapat menyebabkan rendahnya nilai IKLH di Provinsi Lampung seperti polusi lingkungan, kerusakan alam, tidak baiknya pengelolaan limbah dan juga rendahnya kesadaran akan lingkungan.

2. Uji Regresi Sederhana

Uji analisis regresi sederhana dalam penelitian ini dilakukan untuk memprediksi apakah variabel bebas IKLH (X) berpengaruh terhadap variabel terikat Kinerja (Y) dan seberapa besarnya pengaruh variabel IKLH (X) tersebut terhadap variabel terikat Kinerja (Y).

Tabel 4.3 Hasil Uji Regresi Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	62,420	3,985		15,665	,000
	IKLH	,138	,057	,366	2,426	,020

Sumber : Diolah Penulis Tahun 2024.

Dari hasil uji pada tabel koefisien regresi menunjukkan nilai koefisien dalam persamaan regresi linier berganda. Nilai persamaan yang dipakai adalah yang berada pada kolom β (koefisien). Standart persamaan regresi linear berganda adalah dapat diperoleh hasil yakni:

$$Y = 62,420 + 0,138 + et$$

Berdasarkan uraian diatas maka persamaan regresi linear berganda ddapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. $Y = 62,420$ yakni Nilai Konstanta (α) sebesar 62,420 yang berarti apabila Provinsi yang ada di wilayah Sumatera sama sekali tidak mempunyai gambaran atau pemahaman tentang IKLH maka dianalogikan nilai Kinerja nilainya tetap 62,420.
- b. $\beta_1 = 0,138$ X yakni Koefisien regresi variabel bebas (X) IKLH diperoleh sebesar 0,138 yang artinya Provinsi yang ada di wilayah Sumatera setiap peningkatan 1 satuan variabel IKLH maka akan mempengaruhi tingkat Kinerja dengan nilainya tetap sebesar 0,138

3. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas IKLH (X) berpengaruh secara parsial atau tidak terhadap variabel terikat Kinerja (Y). Dengan dasar pengambilan keputusan :

- a. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < 0,05$ maka terdapat pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) maka H_a diterima H_o ditolak.
- b. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai $sig > 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh variabel bebas (X)) terhadap variabel terikat (Y) maka H_a ditolak dan H_o diterima.

Dengan rincian menentukan nilai t_{tabel} sebagai berikut :

- a. Menggunakan t_{tabel} dengan tingkat kepercayaan $95\% = 0,05$
- b. Rumus mencari $t_{tabel} = t(a/2 ; n-k)$
- c. Maka $t = (0,05/2) = 0,025$ dan $(40-2) = 38$
- d. Sehingga $0,025$ dengan 38 didapatkan nilai t_{tabel} sebesar $2,024$ (terlampir t_{tabel})

Keterangan :

- n : Jumlah Sampel
- k : Jumlah Variabel Bebas (X)
- a : Nilai Konstanta

Tabel 4.4 Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	62,420	3,985		15,665	,000
	IKLH	,138	,057	,366	2,426	,020

Sumber : Diolah Penulis Tahun 2024.

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas didapatkan nilai t_{hitung} variabel bebas IKLH (X) sebesar $2,426$ dan nilai sig $0,020$ sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini untuk variabel IKLH (X) dengan didapatkan nilai t_{hitung} $2,426 > t_{tabel}$ $2,024$ dengan tingkat $Sig.$ $0,020 < 0,05$. Sehingga variabel IKLH (X) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja (Y) di 10 Provinisi wilayah Sumatera periode tahun 2019-2022. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis H_a diterima dan H_o ditolak.

Pengaruh Lingkungan Hidup Terhadap Kinerja

Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Pengukuran lingkungan hidup dapat diukur menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat tentang suatu kondisi atau mutu lingkungan hidup pada ruang dan periode tertentu. Unit analisis terkecil dalam IKLH nasional adalah Provinsi. Pemerintah Provinsi dapat menjadikan IKLH sebagai titik referensi untuk menuju angka ideal yaitu nilai indeks maksimum. Semakin rendah dari nilai maksimum semakin besar upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan.

Sedangkan kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Salah satu pengukuran tingkat kinerja di suatu Provinsi dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan sebuah alat untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dalam hal ini masyarakat atau penduduk. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Lingkungan hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemda di wilayah Sumatera hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji t dimana nilai t_{hitung} variabel bebas IKLH (X) sebesar 2,426 dan nilai sig 0,020 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini untuk variabel IKLH (X) dengan didapatkan nilai t_{hitung} $2,426 > t_{tabel}$ 2,024 dengan tingkat Sig. $0,020 < 0,05$. Sehingga variabel IKLH (X) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja (Y) di 10 Provinsi wilayah Sumatera periode tahun 2019-2022. Dengan demikian berarti lingkungan hidup merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah yang dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Lingkungan hidup berpengaruh terhadap kinerja sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Budding (2004) dimana hasil penelitian menunjukkan lingkungan berdampak terhadap meningkatnya kinerja pemerintah. Dan penelitian yang dilakukan oleh Taliento, Favino & Netti (2019) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial, lingkungan dan tata kelola berperan penting dalam meningkatkan kinerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh lingkungan hidup terhadap kinerja Pemda di wilayah Sumatera diketahui bahwa hasil perhitungan nilai $t_{hitung} 2,426 > t_{tabel} 2,024$ dengan tingkat *Sig.* $0,020 < 0,05$. Sehingga variabel IKLH (X) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja (Y) di 10 Provinsi wilayah Sumatera periode tahun 2019-2022. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis H_a diterima dan H_o ditolak. Penelitian ini terbatas karena hanya menggunakan 40 sampel penelitian dengan cara menganalisis kinerja Pemerintah Daerah di 10 Provinsi yang berada di wilayah Sumatera periode tahun 2019-2022. Oleh karena itu disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk menambahkan sampel penelitian dan variabel bebas lainnya yang dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Budding, G. T. *Accountability, Environmental Uncertainty And Government Performance: Evidence From Dutch Municipalities*. Management Accounting Research, Vol 15 No 3, 2004.
- Direktorat Jendral Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup. *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*. Kementrian Lingkungan Hidup. Jakarta. 2022.
- Emil Salim. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. LP3ES. Jakarta. 2017.
- Ghozali, Imam. *Desain Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Undip Press. Yogyakarta. 2018.
- Gustianra, Vegy Dan Serly, Vanica. *Pengaruh Good Government Governance Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia Yang Terdapat Pada Indonesia Governance Indexs Tahun 2014)*. JEA : Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol 1 No 3 Tahun 2019.
- Harumiati, Yayuk Dan Payamta. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2011*. Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan Vol 3 No 2 Tahun 2014.
- Hermawan, Sigit Dan Maf'ulah Afiyah. *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Pemoderasi*. Jurnal Dinamika AKuntansi Vol 6 No 2 Tahun 2014.
- Hutapea, Lastiar Dan Widyaningsih, Aristanti. *Pengaruh Good Government Governance Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia)*. Jurnal Akuntansi Riset Vol 9 No 1 Tahun 2017.

- Jatmiko Bambang. *Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman)*. Jurnal Akuntansi Trisakti Vol 7 No 2 Tahun 2020.
- Kurniati, Indah Pratiwi Dan Syafruddin M. *Peran Kualitas Audit Memoderasi Pengaruh Afiliasi Kelompok Bisnis Terhadap Manajemen Laba*. Diponegoro Journal Accounting. Vol 8 No 2 Tahun 2019.
- Lestiwani, Handu Yuniar Dan Jatmiko, Bambang. *Key Success Factor Good Government Governance Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah (Survey Pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)*. Jurnal Maksimum : Media Akuntansi Universitas Muhamdiyah Semarang Vol 5 No 1 Tahun 2015.
- M Ahyaruddin dan M. Faisal Amrillah. *Faktor Penentu Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol 9 No 3 Tahun 2018.
- Marisca dan Haryadi. *Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jambi*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol 3 No 3 Tahun 2016.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2018.
- Noviyanti, Nur Ade Dan Kiswanto. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. AAJ : Accountin Analysis Journal Vol 5 No 1 Tahun 2016.
- Nugroho, Tatas Ridho Dan Prasetyo, Novi Eko. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur*. Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan Vol 7 No 1 Tahun 2018.
- Pahlevi, Agus Reza Dan Setiawan, Doddy. *Apakah Karakteristik Kepala Daerah Berdampak Terhadap Kinerja Pemerintahan*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol 8 No 3 Tahun 2017.
- Sedarmayanti. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi Dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima Dan Kepemerintahan Yang Baik)*. Refika Aditama. Bandung. 2017.
- Sesotyaningtyas. *Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Accounting Analysis Journal Vol 1 No 1 Tahun 2012.
- Suryani, Chandra. *Buku Ajar Pengendalian Pencemaran Udara*. Andi Offset. Yogyakarta. 2017.
- Sutrisno, Mufarokah Dan Purnomosidhi, Bambang. *Pengaruh Budaya Organisasi , Gaya Kepemimpinan, dan Kompetensi Terhadap Kinerja*

- Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Bangkalan)*. Jurnal Infestasi Vol 9 No 2 Tahun 2013.
- Taliento, Marco, Favino Chrsitian & Netti, Antonio. *Impact of Environmental, Social, and Governance Information on Economic Performance: Evidence of a Corporate 'Sustainability Advantage' from Europe*. MDPI : Journal Sustainability. 2019.
- Tama, I Gusti Dan Adi, Priyo Hari. *Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah, dan Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Daerah*. Sinta 3 Vol 1 No 1 Tahun 2018.
- Weitz-Shapiro, Rebecca & Winters, Matthew S. *Political Participation and Quality of Life*. Inter-American Development Bank 2008.